

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
I.1 Struktur Organisasi.....	1
I.2 Tugas dan Fungsi.....	2
I.3 Keadaan Pegawai	3
I.3.1 Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja.....	3
I.3.2 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	4
I.3.3 Berdasarkan Tingkat Penjenjangan.....	5
I.3.4 Berdasarkan Eselon	6
I.4 Keuangan.....	6
I.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	7
BAB II.....	9
PERENCANAAN KINERJA.....	9
II.1 Perencanaan Strategis	9
II.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	9
II.1.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah	10
II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	12
II.3 Rencana Anggaran Tahun 2018	16
II.3.1 Target Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018	16
II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	17
BAB III.....	18
AKUNTABILITAS KINERJA	18
III.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	18
III.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	21
III.2.1 Indeks Kepuasan Jamaah Haji terhadap Pelayanan Transportasi EHA	21
III.2.2 Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka Pangkalan Bun	30
III.2.3 Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah.....	33
III.2.4 Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan	35
III.2.5 Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan yang Melibatkan Angkutan Umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)	37
III.3 Akuntabilitas Keuangan	38

BAB IV	43
PENUTUP	43
IV.1 Tinjauan Umum Keberhasilan.....	43
IV.2 Permasalahan yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja	44
IV.3 Strategi Pemecahan Masalah	44
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Misi Kedua	10
Tabel II.2 Keterkaitan Misi dan Tujuan Dinas Perhubungan	11
Tabel II.3 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018	11
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	12
Tabel II.5 Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Tahun 2018.....	13
Tabel II.6 Target Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.....	16
Tabel II.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis.....	17
Tabel III.1 Pengukuran Kinerja Beserta Evaluasi Tujuan dan Sasaran Tahun 2018.....	18
Tabel III.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran	19
Tabel III.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD	20
Tabel III.4 Pengolahan Indeks Kepuasan Calon Jemaah Haji Per Responden dan Per Unsur Pelayanan	23
Tabel III.5 Nilai Rata – Rata Unsur dari Masing – Masing Unit Pelayanan	24
Tabel III.6 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	24
Tabel III.7 Jumlah responden berdasarkan pekerjaan	25
Tabel III.8 Hasil IKM Total Jasa Layanan Umum	26
Tabel III.9 Jumlah Penumpang.....	30
Tabel III.10 Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan.....	36
Tabel III.11 Realisasi Keuangan.....	38
Tabel III.12 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018	39
Tabel III.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	40
Tabel III.14 Anggaran yang Terealisasi pada Tahun 2018 Berdasarkan Program/Kegiatan	41
Tabel III.15 Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	42
Tabel IV.1 Capaian Kinerja dari Pengukuran IKU atau Capaian Kinerja RPJMD	43

DAFTAR GAMBAR



Gambar I.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	2
Gambar I.2 Prosentase Distribusi Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Unit Kerja (%)	4
Gambar I.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Perhubungan	5
Gambar I.4 Penjenjangan Pegawai Dinas Perhubungan	5
Gambar I.5 Jumlah Eselon di Dinas Perhubungan	6
Gambar III.1 Grafik Jumlah Prosentase Responden Embarkasi Haji Antara	25
Gambar III.2 Grafik Nilai Unsur Pelayanan	27
Gambar III.3 Dokumentasi Keberangkatan	28
Gambar III.4 Dokumentasi Kepulangan	29
Gambar III.5 Dokumentasi Terminal Penumpang	32
Gambar III.6 Dokumentasi Kegiatan di Dermaga Sungai	34
Gambar III.7 Dokumentasi Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	36

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I Berisi :

1. *Struktur Organisasi*
2. *Tugas dan Fungsi*
3. *Keadaan Pegawai*
4. *Keuangan*
5. *Sistematika LKIP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 diharapkan dapat:

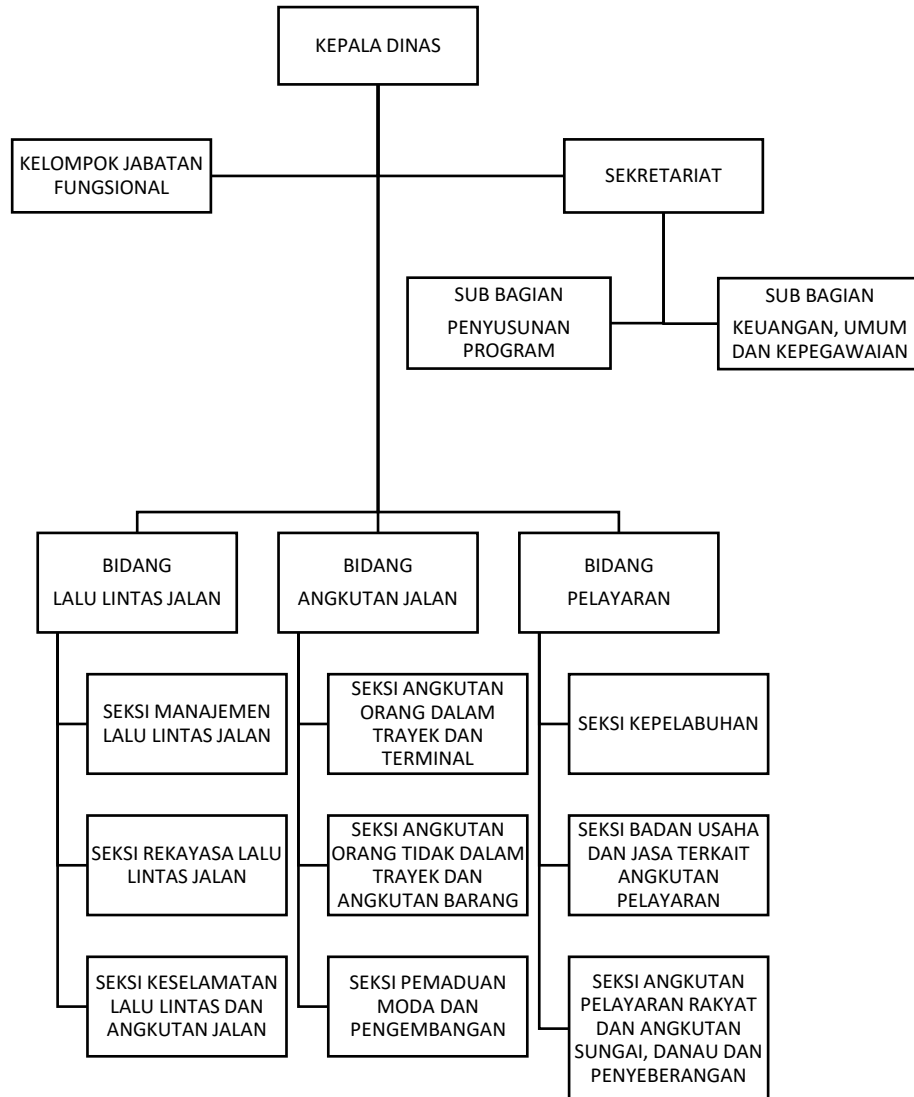
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Mendorong Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

I.1 Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar I.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



I.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tanggal 27 Desember 2016 menetapkan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;

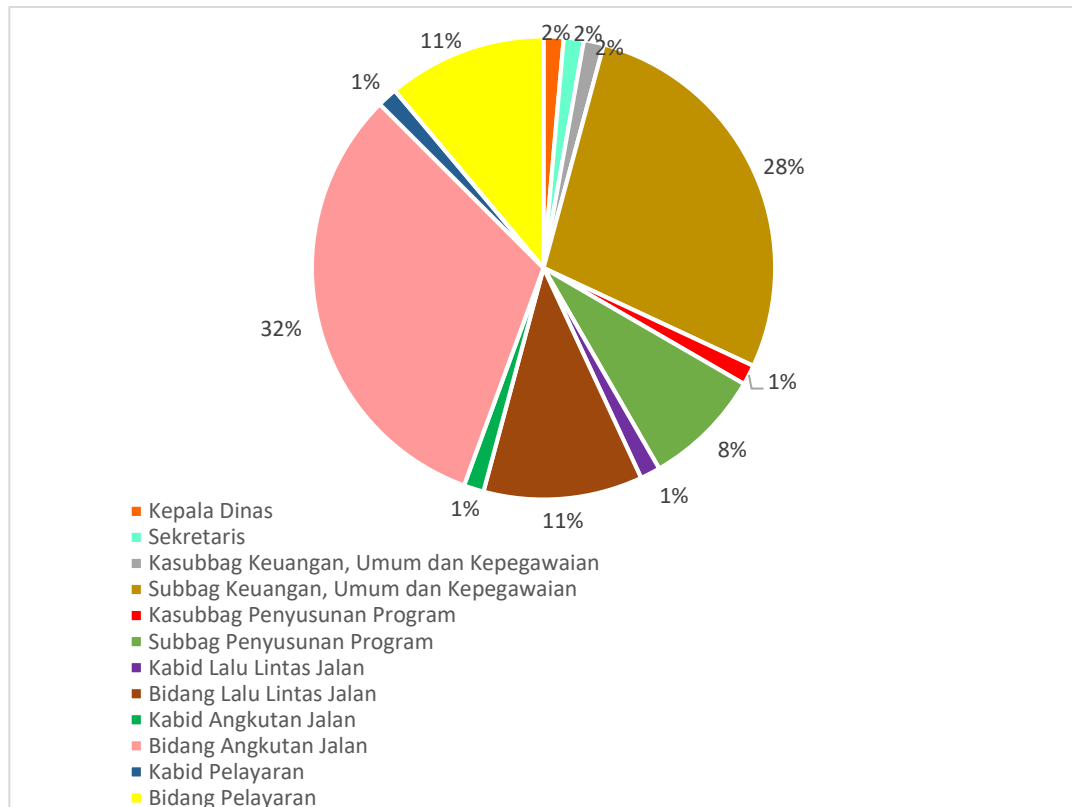
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Provinsi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi.

I.3 Keadaan Pegawai

I.3.1 Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja

Sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2016, komposisi pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan tengah sampai dengan tahun 2018 berjumlah total 72 orang dengan rincian sebagai berikut, Kepala Dinas berjumlah 1 orang dengan prosentase 2,70%, Sekretaris Dinas berjumlah 1 orang dengan prosentase 2,70%, Kasubbag Keuangan, Umum dan Kepegawaian berjumlah 1 orang dengan prosentase 2,70%, Subbag Keuangan, Umum dan Kepegawaian berjumlah 20 orang dengan prosentase 27,77%, Kasubbag Penyusunan Program 1 orang dengan prosentase 2,70%, Subbag Penyusunan Program berjumlah 6 orang dengan prosentase 8,33%, Kabid Lalu Lintas Jalan berjumlah 1 orang dengan prosentase 2,70%, Bidang Lalu Lintas Jalan berjumlah 8 orang dengan prosentase 11,11%, Kabid Angkutan Jalan berjumlah 1 orang dengan prosentase 2,70%, Bidang Angkutan Jalan berjumlah 23 orang dengan prosentase 31,94%, Kabid Pelayaran berjumlah 1 orang dengan prosentase 2,70%, Bidang Pelayaran berjumlah 8 orang dengan prosentase 11,11%. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada gambar berikut.

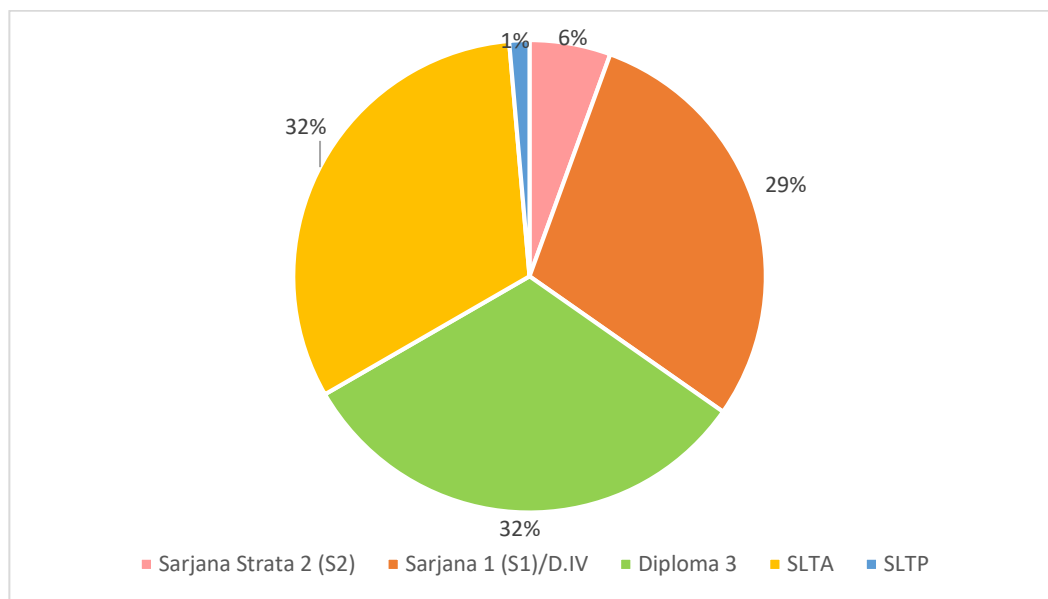
Gambar 1.2 Prosentase Distribusi Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Unit Kerja (%)



1.3.2 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Distribusi pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tingkat pendidikan hingga dengan tahun 2018 dirinci sebagai berikut, Sarjana Strata 3 (S3) tidak ada (0%), Sarjana Strata 2 (S2) berjumlah 4 orang dengan prosentase 5,55%, Sarjana 1 (S1)/D.IV berjumlah 21 orang dengan prosentase 29,16%, Diploma 3 (D3) berjumlah 23 orang dengan prosentase 31,94%, SLTA sederajat berjumlah 23 orang dengan prosentase 31,94%, SLTP sederajat berjumlah 1 orang dengan prosentase 1,38%, dan terakhir tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) tidak ada (0%). Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada gambar berikut:

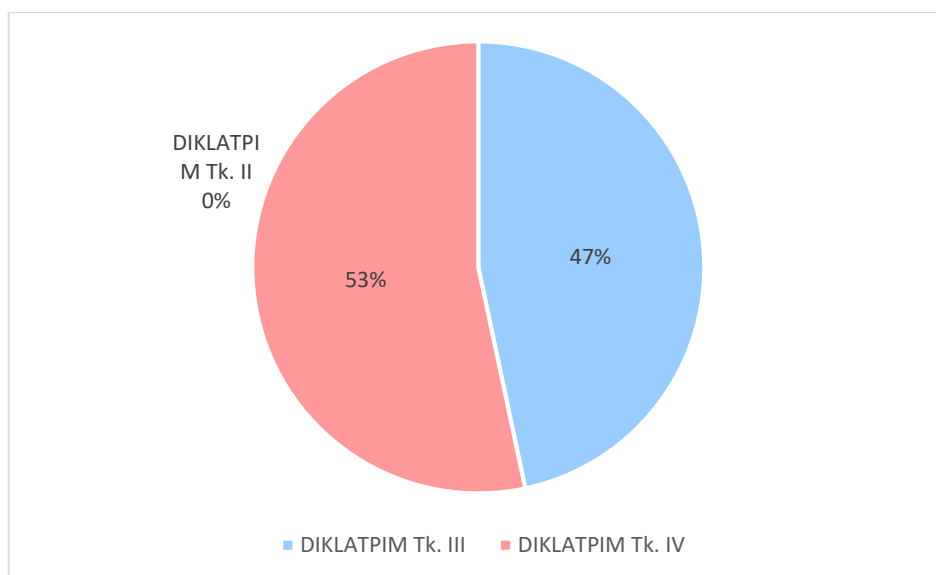
Gambar I.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Perhubungan



I.3.3 Berdasarkan Tingkat Penjenjangan

Distribusi pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tingkat penjenjangan hingga tahun 2018 dirinci sebagai berikut, DIKLATPIM Tingkat II tidak ada (0%), DIKLATPIM Tingkat III berjumlah 7 orang dengan prosentase 46,67% dan terakhir DIKLATPIM Tingkat IV berjumlah 8 orang dengan prosentase 53,33%. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada gambar berikut:

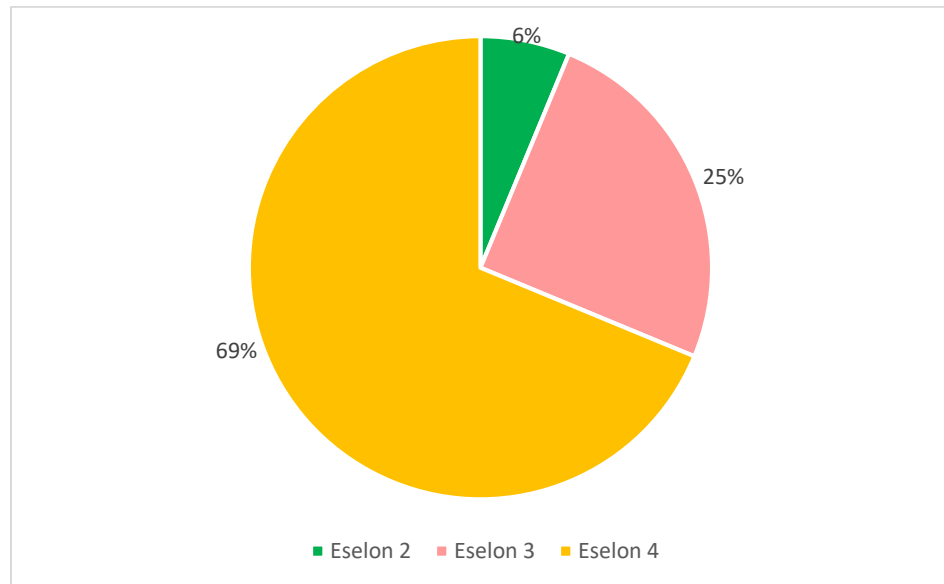
Gambar I.4 Penjenjangan Pegawai Dinas Perhubungan



I.3.4 Berdasarkan Eselon

Distribusi pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan jumlah eselon hingga tahun 2018 di rinci sebagai berikut, Eselon Golongan 2 berjumlah 1 orang dengan prosentase 6,25%, Eselon 3 berjumlah 4 orang dengan prosentase 25%, Eselon 4 berjumlah 11 orang dengan prosentase 68,75%. Dengan total 16 orang. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar I.5 Jumlah Eselon di Dinas Perhubungan



I.4 Keuangan

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaian sasaran selanjutnya dijabarkan secara lebih sistematis ke dalam program kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun anggaran 2018, Dinas Perhubungan melaksanakan 11 (sebelas) program dan 47 (empat puluh tujuh) kegiatan yang meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan;
6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
9. Program Penyelenggaraan Sosialisasi Seminar, Publikasi, Dan Workshop;

10. Program Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan;
11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah.

Pagu total anggaran setelah perubahan belanja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah yang dibiayai APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2018 sebesar Rp 21.600.807.818,- dengan rincian belanja tidak langsung Rp 9.337.369.477,- dan belanja langsung Rp 12.263.438.341,-

I.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut;
2. Disebutkan pula langkah ke depan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilaksanakan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- B. Realisasi Anggaran
- Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

- 1) Perjanjian Kinerja;
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab II Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2018*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2018*

II.1 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan wewenang desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang

Perhubungan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Dinas Perhubungan berpedoman pada dokumen perencanaan antara lain :

1. RPJMD 2016 – 2021;
2. RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah 2016 – 2021;
3. Penetapan Kinerja Tahun 2018;
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

II.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:

Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis).

Misi :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi;
2. Pengelolaan Infrastruktur;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai;
4. Pengendalian Inflasi, Perteumbuhan Ekonomi, Pgentasan Kemiskinan;
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah;
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan Tugas dan Fungsinya, maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam Misi kedua, yaitu :

Pengelolaan Infrastruktur

Misi ini memiliki tujuan dan sasaran sebagaimana berikut :

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Misi Kedua

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
2	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas	2.1	Meningkatnya konektivitas antar daerah	2.1	Pemerataan infrastruktur wilayah	2.1	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung komunikasi dan informasi
		2.2	Meningkatkan ketercukupan energi			2.2	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi
						2.3	Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar kabupaten/kota yang layak
						2.4	Peningkatan ketercukupan energi

II.1.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dibuat guna mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Visi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah

Terwujudnya Sistem Transportasi Yang Handal Dalam Kerangka Pembangunan Kalimantan Tengah Menuju Kalteng Berkah (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

2. Misi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
 - 1) Meningkatkan pelayanan transportasi yang aman dan nyaman.
 - 2) Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi guna terciptanya keselamatan transportasi.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Tabel II.2 Keterkaitan Misi dan Tujuan Dinas Perhubungan

No	Misi	Tujuan
1	Meningkatkan Pelayanan Transportasi yang Aman dan Nyaman.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi
2	Meningkatkan dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana Transportasi guna Terciptanya Keselamatan Transportasi.	Terwujudnya Keselamatan Transportasi

Sasaran strategis mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Peningkatan Kualitas pelayanan transportasi	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan jamaah Haji terhadap Pelayanan Transportasi EHA
			Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang Pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P.Bun
			Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah

2	Terwujudnya Keselamatan Transportasi	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan
			Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang berada di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2018 :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Jemaah Haji terhadap Pelayanan Transportasi EHA	%	2
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun	%	2
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah	%	10
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan	%	1

		Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)	%	100
--	--	---	---	-----

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Pelayanan Angkutan	4.900.000.000	
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1.220.000.000	
3	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	75.000.000	
4	Penyelenggaraan Sosialisasi Seminar, Publikasi dan Workshop	150.000.000	
5	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	850.000.000	
Jumlah		7.195.000.000	

Berikut merupakan program/kegiatan prioritas yang mendukung indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.

Tabel II.5 Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program/Kegiatan	Realisasi (Rp)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Jemaah Haji terhadap Pelayanan Transportasi EHA	2	%	Peningkatan Pelayanan Angkutan Transportasi Embarkasi Haji Antara Bandara Tjilik Riwut dengan Rute Palangkaraya - Banjarmasin	4.141.078.975
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal	2	%	Peningkatan Pelayanan Angkutan Penertiban dan Pengawasan Angkutan Jalan	92.472.500

		Sunggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun			Monitoring Program Pembangunan Dishub	74.632.750
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
					Peningkatan dan Pengembangan Fasilitas Terminal Tipe B (Terminal Natai Suka dan Terminal Sanggu Buntok)	560.599.600
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah	10	%	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
					Rehabilitasi Dermaga Sungai di Kalimantan Tengah (Dermaga Samuda dan Dermaga Maliku)	629.218.150
					Peningkatan Pelayanan Angkutan	
					Pengawasan Angkutan Sungai	74.874.070
					Monitoring Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pelayaran	74.428.600
	2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	1	%	Peningkatan Pelayanan Angkutan	
					Monitoring Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	63.222.600

		Jumlah Kebutuhan			Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	
					Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Kumai – Kubu	267.396.599
					Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Riam Durian – Sukamara	271.918.519
					Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi di Kota Palangka Raya	234.453.500
		Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)	100	%	Peningkatan Pelayanan Angkutan	
					Pemantauan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	49.570.640
					Monitoring Angkutan Penumpang	73.153.700
					Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	
					Pemeliharaan/ Perbaikan Instalasi Lalu Lintas (Traffic	62.695.900

					Light, Warning Light, LPJU Tenaga Surya)	
					Program Penyelenggaraan Sosialisasi Seminar, Publikasi, dan Workshop	
					Sosialisasi Keselamatan LLAJ melalui forum Lalu Lintas Jalan	95.174.750

II.3 Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada tahun anggaran 2018 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan dengan anggaran APBD Murni sebesar Rp 21.361.369.477,- Melalui mekanisme APBD Perubahan 2018 menjadi Rp 21.600.807.818,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 9.337.369.477,- dan Belanja Langsung Rp 12.263.438.341,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 17.629.230.960,- (81,61%) dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung Rp 6.567.964.991,- (70,34%) dan Belanja Langsung Rp 11.061.265.969,- (90,20%).

II.3.1 Target Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

Tabel II.6 Target Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah

Uraian	Target (Rp)	Prosentase (%)
Belanja Tidak Langsung	9.337.369.477	43,2
Belanja Langsung	12.263.438.341	56,8
Jumlah	21.600.807.818	100

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2018 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah yang semula dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp 7.195.000.000,- berubah menjadi Rp 7.020.000.000,- karena pada kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan sebesar Rp 175.000.000,- tidak dilaksanakan, berikut tabel belanja langsung per sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah :

Tabel II.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Prosentase (%)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	5.745.000.000	81,8	Didukung dua program dan tujuh kegiatan
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	1.275.000.000	18,2	Didukung empat program dan delapan kegiatan
Jumlah		7.020.000.000	100	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III Berisi :

1. *Capaian Kinerja Organisasi*
2. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi*
3. *Akuntabilitas Keuangan*

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan pencapaian kinerja melalui upaya-upaya strategis dan operasional yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam rangka pemenuhan visi dan misi serta sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Pengukuran dan analisa capaian kinerja

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 menggunakan metode yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan tengah Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel III.1 Pengukuran Kinerja Bersama Evaluasi Tujuan dan Sasaran Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Jamaah Haji terhadap Pelayanan Transportasi EHA	2	1,9	95
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun	2	68,81	3.441
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah	10	5,65	56,51
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan	1	1,44	144

		Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)	100	100	100
--	--	---	-----	-----	-----

Tabel III.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Th. 2016 (n-1)	Th. 2017 (n)	Th. 2018 (n)
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Jamaah Haji terhadap Pelayanan Transportasi EHA	2	-	1,9	1,9
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun	2	-	14,41	68,81
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah	10	-	9,99	5,65
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan	1	-	1,39	1,44
		Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)	100	-	0	100

Tabel III.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Th. 2017	Realisasi Th. 2018	Tingkat Kemajuan (%)
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Jamaah Haji terhadap Pelayanan Transportasi EHA	10	1,9	1,9	38
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun	13	14,41	68,81	640,1
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah	50	9,99	5,65	31,28
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan	5	1,39	1,44	56,6
		Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang	100	0	100	100

		melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)				
--	--	---	--	--	--	--

III.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

III.2.1 Indeks Kepuasan Jamaah Haji terhadap Pelayanan Transportasi EHA

Pada tahun 2018 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Transportasi Embarkasi Haji Antara. Mencapai realisasi sebesar 1,9 % dari target yang ditetapkan sebesar 2 % atau 72 % dari target tahun lalu yaitu 70 %, berikut merupakan metode yang digunakan dalam pengolahan data:

a. Metode Pengolahan Data

Penentuan jumlah reponden dipilih secara acak dari calon jamaah haji, untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks responden terpilih ditetapkan dengan rumus Slovin dengan batas kesalahan 10% dan tingkat akurasi 90 %.

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Batas Toleransi Kesalahan (error tolerance)

Dari Rumus diatas maka didapat jumlah responden sebanyak 100 orang dengan perhitungan.

Jumlah Jemaah Haji Tahun 2018 adalah 1.630 Orang (Jumlah Populasi = N)

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{1.630}{1 + 1.630 \times 10 \% ^2} \\
 &= \frac{1.630}{16,31} \\
 &= 99,93 = 100
 \end{aligned}$$

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata – rata tertimbang” masing – masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 8 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$ \begin{aligned} \text{Bobot Nilai} \\ \text{Tertimbang} &= \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{8} = 0,125 \end{aligned} $
--

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata – rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$ \text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Presepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} $
--

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian IKM yaitu 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$ \text{IKM Unit Pelayanan} \times 25 $

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- a) Menambah unsur yang dianggap relevan.
- b) Memberikan bobot yang berbeda terhadap 8 (delapan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel III.4 Pengolahan Indeks Kepuasan Calon Jemaah Haji Per Responden dan Per Unsur Pelayanan

Nomor Urut Responden	Nilai Per Unsur Pelayanan							
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8
1								
2								
3								
Dst.								
Jml nilai per unsur								
NRR Per Unsur = Jml nilai per unsur : Jml kuesioner yg terisi								
NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,125								*)
								**))

Keterangan :

- U1 s.d U8
- NRR : Nilai rata-rata
- IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) : Jumlah NRR IKM Tertimbang
- **) : IKM Unit Pelayanan X 25

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kepuasan Calon Jemaah Haji, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai Indeks Komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,125.

Tabel III.5 Nilai Rata – Rata Unsur dari Masing – Masing Unit Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Kedisiplinan petugas yang melayani	
2	Tanggung jawab petugas	
3	Ketepatan waktu penjemputan	
4	Kepastian jadwal keberangkat	
5	Kesopanan dan keramahan petugas	
6	Kemudahan dalam pelaksanaan embarkasi haji antara	
7	Kenyamanan transportasi	
8	Keamanan pelayanan transportasi	

Dari tabel diatas Nilai Indeks Unit Pelayanan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$(U1 \times 0,125) + (U2 \times 0,125) + (U3 \times 0,125) + (U4 \times 0,125) + (U5 \times 0,125) + (U6 \times 0,125) + (U7 \times 0,125) + (U8 \times 0,125) = \text{Nilai Indeks}$$

- Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks \times Nilai Dasar
- Mutu Pelayanan **A/B/C/D**.
- Kinerja Unit Pelayanan **Sangat Baik/Baik/Kurang Baik/Tidak Baik**.

Tabel III.6 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval Ikm	Nilai Interval Konversi Ikm	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

b. Hasil Survey

Dari hasil Survey Indeks Kepuasan Calon Jamaah Haji yang telah dilaksanakan pada 11-19 September 2018 didapatkan hasil sebagai berikut:

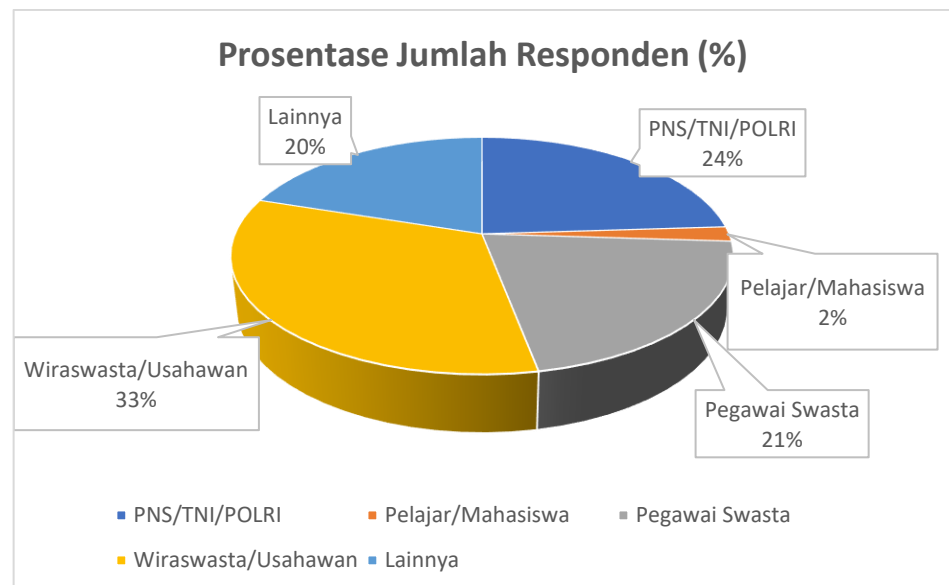
1) Jumlah Responden Total IKM – Embarkasi Haji Antara

Responden Survey Indeks Kepuasan Calon Jamaah Haji ini adalah sebanyak 100 orang jamaah haji dari jumlah total responden terdiri dari berbagai jenis pekerjaan antara lain : PNS/ TNI/ POLRI 24 orang, Pelajar/Mahasiswa 2 orang, Pegawai Swasta 21 orang, Wiraswasta/Usahawan 33 orang, Lainnya 20 orang.

Tabel III.7 Jumlah responden berdasarkan pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Prosentasi
1	PNS/TNI/POLRI	24	24%
2	Pelajar/Mahasiswa	2	2%
3	Pegawai Swasta	21	21%
4	Wiraswasta/Usahawan	33	33%
5	Lainnya	20	20%
Total		100	100%

Gambar III.1 Grafik Jumlah Prosentase Responden Embarkasi Haji Antara



Berdasarkan **Tabel III.7** dan **Gambar III.1** dapat diketahui bahwa Jumlah Responden Jamaah Haji Jenis Pekerjaan Utama di dominasi oleh Wiraswasta/Usahawan sebanyak 33%.

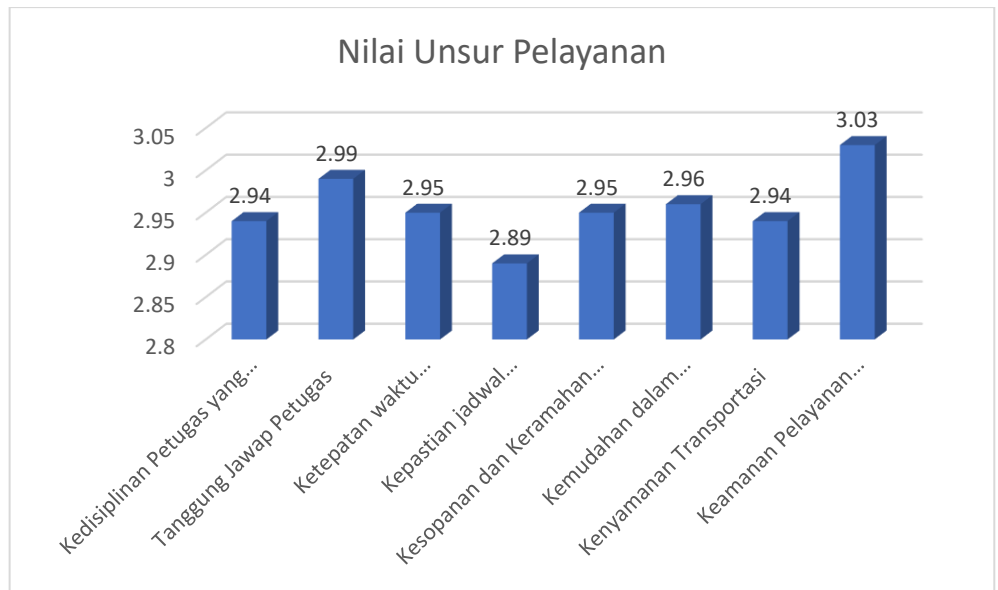
2) Hasil Survey IKM Bidang Jasa Layanan Umum Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Per Unsur Pelayanan

Dari keseluruhan Kusiner IKM yang terkumpul dihasilkan nilai IKM total bidang jasa layanan umum Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Per unsur Pelayanan sebagai berikut:

Tabel III.8 Hasil IKM Total Jasa Layanan Umum

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Kedisiplinan Petugas yang melayani	2,94
2	Tanggung Jawab Petugas	2,99
3	Ketepatan waktu Penjemputan	2,95
4	Kepastian jadwal Keberangkatan	2,89
5	Kesopanan dan Keramahan Petugas	2,95
6	Kemudahan dalam Pelaksanaan Embarkasi Haji Antara	2,96
7	Kenyamanan Transportasi	2,94
8	Keamanan Pelayanan Transportasi	3,03
Nilai Indeks Kepuasan		2,96
Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = 2,96 x 25		73,91
Mutu Pelayanan		B
Kinerja Unit Pelayanan		Baik

Gambar III.2 Grafik Nilai Unsur Pelayanan



Dari hasil **Tabel** dan **Gambar** diatas diketahui bahwa nilai unsur pelayanan Transportasi Embarkasi Haji Antara yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dinilai baik dilihat dari hasil perhitungan survey IKM yang telah dilakukan dan mendapat hasil kinerja unit **BAIK** dengan mutu pelayanan **B** dalam angka 73,91.

Target yang ingin dicapai dari Indeks Kepuasan masyarakat ini adalah 74% atau meningkat 2% dari perolehan tahun lalu sebesar 71,91%. Adapun belum tercapainya target ini dikarenakan terdapat salah satu unsur penilaian yang dianggap kurang oleh pengguna jasa pelayanan yakni unsur kepastian jadwal keberangkatan yang melayani dengan nilai 2,89%. Selanjutnya dari hasil tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah akan meningkatkan kinerja pada jadwal keberangkatan pegawai yang bertugas untuk lebih disiplin, tepat waktu, ramah, dan sopan dalam melayani jamaah haji pada tahun 2018 sehingga target yang ditentukan akan tercapai.

Gambar III.3 Dokumentasi Keberangkatan

Dokumentasi Keberangkatan Embarkasi Haji Antara (EHA) Tahun 2018



Gambar III.4 Dokumentasi Kepulangan

Dokumentasi Kepulangan Embarkasi Haji Antara (EHA) Tahun 2018



III.2.2 Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka Pangkalan Bun

Semakin bertambahnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah tidak dipungkiri bahwa mobilitas penduduk Kalimantan Tengah juga meningkat.

Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang, maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 2 terminal Tipe B yang menjadi kewenangannya yaitu Terminal Tipe B Sanggu yang berada di Buntok dan Terminal Tipe B Natai Suka di Pangkalan Bun.

Terdapat beberapa penyedia jasa transportasi yang melayani 2 terminal tersebut antara lain :

a. Terminal Natai Suka (Pangkalan Bun)

Penyedia yang melayani :

- 1) Damri
- 2) PO. Logos
- 3) PO. Yesso
- 4) PO. Agung Mulia

b. Terminal Sanggu (Buntok)

Penyedia yang melayani :

- 1) Tiga Putra
- 2) Remaja
- 3) Damri
- 4) L300 (Kepemilikan Pribadi)

Dari keseluruhan penyedia jasa transportasi yang melayani Terminal Tipe B Tahun 2018 didapat jumlah penumpang sebesar 171.014 orang. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.9 Jumlah Penumpang

No	Terminal	Jumlah Penumpang (Orang)			
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
1	Natai Suka	20.658	41.493	46.754	48.245
2	Sangu	290	4.860	4.890	3.824
	Jumlah	20.948	67.301	118.945	171.014

Realisasi dari prosentase peningkatan jumlah penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka Pangkalan Bun adalah sebesar 68,81% dari 2% yang ditargetkan atau capainnya berjumlah 3.441%, Nilai ini diperoleh dari :

$$f(y) = \frac{\sum \text{Jumlah Penumpang Tahun } n - (n - 1)}{\sum \text{Jumlah Penumpang Tahun } (n - 1)} \times 100 \%$$

Keterangan :

$f(y)$: Prosentase peningkatan jumlah Penumpang
$\sum \text{Jumlah Penumpang Tahun } n-(n-1)$: Selisih jumlah penumpang pada Tahun 2018 – 2017
$\sum \text{Jumlah Penumpang Tahun } (n-1)$: Jumlah penumpang tahun 2017

$$f(y) = \frac{171.014 - 101.034}{101.034} \times 100\% = 68,81\%$$

Peningkatan jumlah penumpang yang sangat signifikan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Fasilitas angkutan penumpang yang sangat memperhatikan kenyamanan penumpang;
- 2) Terbukanya akses dari dan menuju Pontianak Kalimantan Barat;
- 3) Diperbaikinya infrastruktur terminal;
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang semakin baik;
- 5) Berkurangnya angkutan travel baik yang resmi maupun yang tidak resmi sehingga para penumpang berpindah menggunakan moda AKDP (Bus Besar).

Terdapat beberapa kegiatan yang mendukung meningkatnya jumlah penumpang :

- 1) Penertiban dan Pengawasan Angkutan Jalan;
- 2) Monitoring Program Pembangunan Dishub;
- 3) Peningkatan dan Pengembangan Fasilitas Terminal Tipe B Natai Suka Pangkalan Bun;
- 4) Peningkatan dan Pengembangan Fasilitas Terminal Tipe B Sanggu Buntok.

Gambar III.5 Dokumentasi Terminal Penumpang

Dokumentasi Terminal Penumpang Tipe B

1. Terminal Natai Suka Pangkalan Bun



2. Terminal Sanggu Buntok



III.2.3 Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah

Jumlah penumpang dan barang ASDP pada tahun 2018 adalah sebesar 266.818 orang dan 37.603 ton. Jumlah ini memperoleh realisasi sebesar 5,65% dari 10% yang ditargetkan, dengan capaian 56,51% pada tahun 2018.

Berikut merupakan rumus perbandingan jumlah penumpang dan barang ASDP :

$$f(y) = \frac{\left(\frac{\sum \text{Jumlah Pnp Tahun } n - (n-1)}{\sum \text{Jumlah Pnp Tahun } (n-1)} \times 100\% \right) + \left(\frac{\sum \text{Jumlah Brg Tahun } n - (n-1)}{\sum \text{Jumlah Brg Tahun } (n-1)} \times 100\% \right)}{2}$$

Keterangan :

$f(y)$: Prosentase peningkatan jumlah penumpang dan barang ASDP di Kalimantan Tengah
$\sum \text{Jumlah Penumpang Tahun } n - (n-1)$: Selisih jumlah penumpang ASDP Pada tahun 2017 – 2018
$\sum \text{Jumlah Penumpang Tahun } (n-1)$: Jumlah penumpang tahun 2017
$\sum \text{Penumpang Tahun } n - (n-1)$: Selisih jumlah barang ASDP pada tahun 2017 – 2018
$\sum \text{Jumlah Penumpang Tahun } (n-1)$: Jumlah barang tahun 2017

$$f(y) = \frac{\left(\frac{266.818 - 212.620}{212.620} \times 100\% \right) + \left(\frac{37.603 - 43.820}{43.820} \times 100\% \right)}{2}$$

$$= 5,65\%$$

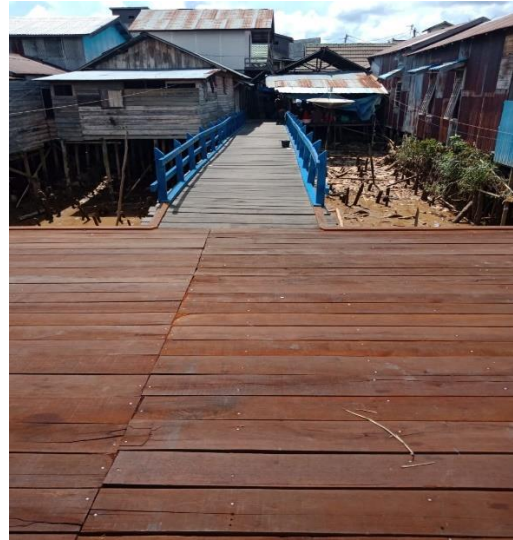
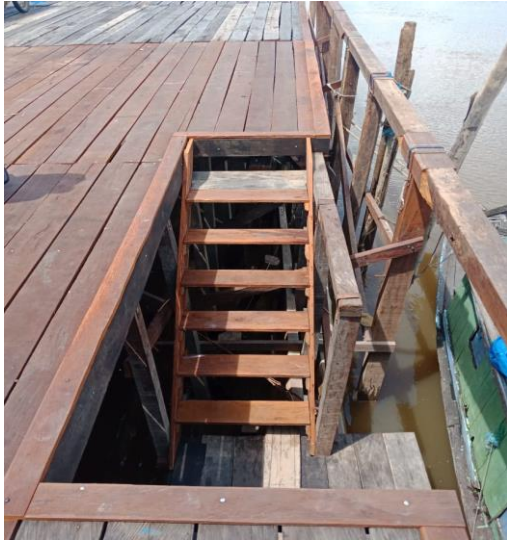
Realisasi ini dinilai kurang baik pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017 karena adanya penurunan jumlah angkutan barang yang beralih ke angkutan jalan, sehingga pada tahun 2019 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah akan lebih meningkatkan kinerja dan mengevaluasi kembali target yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut, yaitu :

- 1) Pengawasan Angkutan Sungai;
- 2) Monitoring Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pelayaran;
- 3) Rehabilitasi Dermaga Sungai Maluku;
- 4) Rehabilitasi Dermaga Sungai Samuda.

Gambar III.6 Dokumentasi Kegiatan di Dermaga Sungai

Dokumentasi Kegiatan di Dermaga Sungai Maluku dan Dermaga Sungai Samuda



III.2.4 Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan

Indikator Kinerja Utama prosentase fasilitas jalan terpasang dibanding jumlah kebutuhan merupakan indikator yang digunakan untuk kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dalam memenuhi kebutuhan fasilitas keselamatan jalan yang seharusnya tersedia sesuai dengan kebutuhan.

Guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya menambah jumlah fasilitas keselamatan jalan yang sesuai dengan kebutuhan, namun tidak dipungkiri jumlah fasilitas keselamatan jalan yang ada saat ini dinilai masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah kebutuhan fasilitas keselamatan dan panjang jalan provinsi yang telah dibangun.

Pada tahun 2018 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah memasang beberapa fasilitas keselamatan jalan dengan jumlah antara lain :

- 1) Rambu Jalan : 256 unit
- 2) Delineator : 196 unit
- 3) Marka Jalan : 1.205 meter

Dalam perhitungan prosentase fasilitas keselamatan jalan terpasang dibanding jumlah kebutuhan dilakukan dengan memprosentasekan terlebih dahulu tingkat prosentase fasilitas keselamatan jalan terpasang perjenisnya, selanjutnya dilakukan perhitungan rata-rata prosentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan.

Dengan rumusan sebagai berikut :

$$f(y) = \frac{\sum Faskes \text{ Jalan Tahun } n}{\sum \text{ Kebutuhan Faskes}} \times 100 \%$$

Keterangan :

$F(y)$: Prosentase Faskes terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan

$\sum Faskes \text{ Jalan Tahun } n$: Jumlah Faskes Terpasang Tahun 2018 (Perjenis Faskes)

$\sum Faskes \text{ Jalan Tahun}$: Jumlah Kebutuhan Faskes (Perjenis Faskes)

Tabel III.10 Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan

No	Uraian	Satuan	Kebutuhan	Terpasang	
				2018	% Pemenuhan 2018
1	2	3	4	5	6
1	Rambu Jalan	Unit	4,249	256	6,02
2	Guadrail	Meter	12,828	-	-
3	Delineator	Unit	18,494	196	1,06
4	Paku Jalan	Meter	118,436	-	-
5	Marka Jalan	Meter	1,015,593	1.205	0,12
Jumlah					7,20
Rata-rata %					1,44

Gambar III.7 Dokumentasi Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan



Ruas Jalan Provinsi di Kota Palangka Raya



III.2.5 Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan yang Melibatkan Angkutan Umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)

Indikator Kinerja Utama prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan kompetensi pengemudi angkutan jalan serta pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan yang telah terpasang. Peningkatan kemampuan dan kompetensi pengemudi angkutan umum serta pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan merupakan salah satu tupoksi pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan yang mendukung indikator tersebut adalah :

- 1) Pemantauan angkutan lebaran, natal, dan tahun baru;
- 2) Monitoring angkutan penumpang;
- 3) Pemeliharaan/perbaikan instalasi lalu lintas (traffic light, warning light, LPJU tenaga surya);
- 4) Sosialisasi Keselamatan LLAJ melalui forum lalu lintas jalan.

Kegiatan tersebut diatas dinilai efektif untuk memenuhi indikator ini karena penurunan angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum akan lebih memberikan pembinaan kepada pengemudi untuk mewujudkan kesadaran dan kedisiplinan serta kepatuhan para pengemudi dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat sebagai pengguna angkutan umum. Sehingga diharapkan tingkat kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di Provinsi Kalimantan Tengah berkurang dari tahun ke tahun hingga menjadi *zero accident*.

Pada tahun 2018 data yang diperoleh menunjukkan bahwa kecelakaan pada tahun 2018 yang melibatkan angkutan umum tidak ada, sehingga target yang diharapkan sebesar 100% dapat tercapai.

Penilaian prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) diperoleh dengan rumusan :

$$f(y) = \frac{\sum \text{Jumlah Laka Angkutan Umum Tahun } (n - 1) - n}{\sum \text{Jumlah Laka Angkutan Umum Tahun } (n - 1)} \times 100 \%$$

f(y) : Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan

\sum Jumlah laka Angkutan Umum tahun (n-1)-n : Selisih Jumlah Kecelakaan
Tahun 2018 - 2017

\sum Jumlah laka Angkutan Umum tahun (n-1) : Jumlah Kecelakaan
Tahun 2017

III.3 Akuntabilitas Keuangan

Pelaksanaan belanja tidak langsung dan belanja langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

- Pagu DPA Murni Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp 21.361.369.477,00 dengan rincian :
 - a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 9.337.369.477,00,-
 - b. Belanja Langsung sebesar Rp. 11.979.000.000,00,-
- Pagu DPA Perubahan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp 21.600.807.818,00 dengan rincian :
 - a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 9.337.369.477,00,-
 - b. Belanja Langsung sebesar Rp 12.263.438.341,00,-

Tabel III.11 Realisasi Keuangan

No	Jenis Belanja	Pagu Dana	Realisasi	
			Keuangan	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Tidak Langsung	9.337.369.477,00	6.567.964.991,00	70,34
2	Belanja Langsung	12.263.438.341,00	11.061.265.969,00	90,20
Jumlah		21.600.807.818,00	17.629.230.960,00	81,61

Tabel III.12 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Jamaah Haji terhadap Pelayanan Transportasi EHA	2	1,9	95	4.200.000.000	4.141.078.975	98,59
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun	2	68,81	3.441	745.000.000	727.704.850	97,68
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah	10	5,65	56,51	800.000.000	778.520.820	97,31
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan	1	1,44	144	925.000.000	836.991.218	90,48
		Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)	100	100	100	350.000.000	280.594.990	80,17

Tabel III.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Jamaah Haji terhadap Pelayanan Transportasi EHA	95	98,59	- 3,59
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun	3.441	97,68	3.343
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah	56,51	97,31	-40,8
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan	144	90,48	53,52
		Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)	100	80,17	19,83

Tabel III.14 Anggaran yang Terealisasi pada Tahun 2018 Berdasarkan Program/Kegiatan

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.691.438.341	3.204.804.305	86,81
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	250.000.000	249.136.650	99,65
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	262.000.000	247.213.550	94,36
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	230.000.000	215.704.011	93,78
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	110.000.000	109.999.800	100
6	Peningkatan Pelayanan Angkutan	5.350.000.000	4.840.210.635	90,47
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1.220.000.000	1.189.817.750	97,53
8	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	75.000.000	62.695.900	83,59
9	Program penyelenggaraan sosialisasi seminar, publikasi, dan workshop	150.000.000	95.174.750	63,45
10	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	850.000.000	773.768.618	91,03
11	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	75.000.000	72.740.000	96,99
Jumlah		12.263.438.341	11.061.265.969	90,20

Tabel III.15 Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	5.745.000.000	5.647.304.645	98,3	Didukung dua program dan tujuh kegiatan
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	1.275.000.000	1.117.586.208	87,7	Didukung empat program dan delapan kegiatan
Jumlah		7.020.000.000	6.764.890.853	96,4	

Bab IV Berisi :

1. *Tinjauan Umum Keberhasilan*
2. *Permasalahan yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja*
3. *Strategi Pemecahan Masalah*

IV.1 Tinjauan Umum Keberhasilan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan penyelenggaraan pemerintah pada tahun 2018 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap Kinerja

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dapat disimpulkan bahwa rata-rata Indikator Kinerja Utama pada tiap-tiap sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) belum tercapai sepenuhnya.

Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan tengah, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel IV.1 Capaian Kinerja dari Pengukuran IKU atau Capaian Kinerja RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Jamaah Haji terhadap Pelayanan Transportasi EHA	2	1,9	95
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun	2	68,81	3.441
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah	10	5,65	56,51

2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan	1	1,44	144
		Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)	100	100	100

IV.2 Permasalahan yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan yang masih menjadi perhatian pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah terkait indikator capaian utama meliputi :

1. Dalam perjanjian kinerja tahun 2018 pada kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan dengan anggaran Rp 175.000.000,- pada program peningkatan pelayanan angkutan sebesar Rp 4.900.000.000,- tidak dilaksanakan;
2. Pada peningkatan jumlah penumpang dan barang ASDP di Kalimantan Tengah. Dari data yang diperoleh pada tahun 2018 terdapat penurunan jumlah angkutan barang yang meliputi angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Kalimantan Tengah yakni 56,61% dari target capaian yang telah ditetapkan yaitu 10% per tahun atau 100%.
Penurunan ini terjadi akibat dari seiring bertambahnya jalan atau angkutan jalan dengan aksesibilitas yang mudah murah dan cepat mengakibatkan pengguna angkutan sungai berpindah ke angkutan jalan serta tingginya target yang telah ditetapkan.

IV.3 Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah akan mengalokasikan kegiatan yang tidak terlaksana tersebut pada kegiatan prioritas dan akan lebih meningkatkan kinerja pada tahun 2019;

2. Melaksanakan evaluasi target capaian yang telah ditetapkan agar sesuai dengan kemampuan yang ada di lapangan.
3. Terdapat barang-barang atau komoditas yang sulit untuk dipindahkan melalui angkutan jalan darat sehingga masih tetap menggunakan angkutan sungai serta akses jembatan dan jalan yang belum memadai sehingga masih perlu dilaksanakan rehabilitasi dermaga sungai, danau, dan penyeberangan serta monitoring pembinaan dan pengawasan di bidang pelayaran dalam upaya peningkatan jumlah penumpang, barang serta keselamatan ASDP di Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Februari 2019
Kepala Dinas,



Ati Mulyati, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19630518 199203 2 004